



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

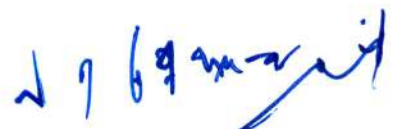
- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dan telah berubah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dengan struktur baru menimbulkan adanya Nomenklatur baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan di atas perlu adanya penyesuaian dalam tabel pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk mengakomodir adanya nomenklatur jabatan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

29/6/2025

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

29/9/2023

8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,



serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 72);

17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5)
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 44)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ditambah 3 ayat yaitu ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 72);
Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5)
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 44)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

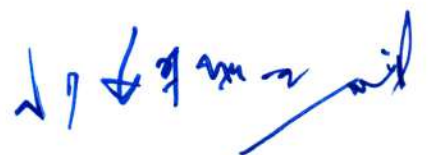
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ditambah 3 ayat yaitu ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari TPP Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (6) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (7) Kekurangan Tambahan TPP ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksanan Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan



ayat (5) dibayarkan sebesar jumlah hari kerja yang telah dilaksanakan.

- (8) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt pada perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur mendapatkan TPP sesuai nomenklatur jabatan yang baru.
- (9) TPP ASN Tambahan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember.
- (10) Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plt pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah mendapatkab TPP sesuai jabatan yang baru sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru.

2. Ketentuan Ayat 2 huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
2. Perangkat Daerah Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Klasifikasi II A adalah Inspektorat Daerah
 - b. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
3. Perangkat Daerah Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Klasifikasi III A adalah sebagai berikut :
 1. BKPSDM.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - b. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah
 - c. Klasifikasi III C adalah sebagai berikut :
 1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas Pendidikan
 - d. Klasifikasi III D adalah Sekretariat Dewan
 - e. Klasifikasi III E adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Klasifikasi III F adalah sebagai berikut :
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Perangkat Daerah Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Klasifikasi IV A adalah sebagai berikut :
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Klasifikasi IV B adalah sebagai berikut :
 1. Kecamatan Purwakarta
 2. Kecamatan Babakan Cikao
 3. Kecamatan Bojong
 4. Kecamatan Bungursari
 5. Kecamatan Campaka
 6. Kecamatan Cibatu
 7. Kecamatan Darangdan
 8. Kecamatan Jatiluhur
 9. Kecamatan Kiarapedes
 10. Kecamatan Maniis
 11. Kecamatan Pasawahan
 12. Kecamatan Plered
 13. Kecamatan Pondoksalam
 14. Kecamatan Sukasari
 15. Kecamatan Sukatani
 16. Kecamatan Tegal Waru
 17. Kecamatan Wanayasa

Handwritten signature in blue ink.

3. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat 4 dan ayat 5 sehingga, pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan pajak daerah paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang memenuhi target pemungutan.
 - (2) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan retribusi paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target pemungutan.
 - (3) Besaran dan Tata Cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) ASN yang menduduki kelas jabatan 5 (lima) tetapi belum memenuhi kualifikasi pendidikan mendapatkan besaran TPP sesuai kelas jabatan terakhirnya.
 - (5) ASN yang memperoleh kenaikan kelas jabatan sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, dengan formasi jabatan yang sama mendapatkan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 41A dan 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Terhadap ASN yang naik jenjang jabatan fungsional muda ke jenjang jabatan madya diberikan subsidi pajak sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana, Pengawas/Eselon IV, Jabatan Fungsional pertama dan Jabatan Fungsional Muda pada golongan IV diberikan Subsidi Pajak diberikan subsidi pajak sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



Pasal 41B









Pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap melaksanakan tugasnya dan mendapatkan hak-hak keuangan dan kepegawaian yang sama sampai dengan ditetapkan pejabat baru.

5. Ketentuan Penutup diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	
Dani Abdurahman, SH, MH	Plt. Inspektur Inspektorat Daerah	
H.Wahyu Wibisono, S.Sos,M.Si, C.MT,C.AC	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
R. Muchamad Nurcahja, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2025
Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWAKARTA

PERHITUNGAN DAN BESARAN TPP ASN

1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah
 - a. Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	70%	55%	0%
2	-		-
3	70%	40%	0%
4	-		-
5	60%	19%	0%
6	70%	23%	0%
7	70%	32%	0%
8	100%	84%	0%
9	100%	63%	0%
10	-	-	-
11	-	-	-
12	100%	57%	0%
13	100%	43%	0%
14	100%	51%	0%
15	100%	100%	24%

- a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	39%
6	70%	37%

7	70%	43%
8	100%	118%
9	100%	90%
10	-	-
11	-	-
12	100%	65%

b. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	100%	24%
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	100%	4 %
J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	100%	27 %
J.F. Arsiparis Penyelia	8	100%	24%
J.F. Arsiparis Pertama	8	100%	24%
J.F. Arsiparis Muda	9	100%	4%
J.F. Arsiparis Madya	11	100%	27%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	100%	45%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	100%	31%
JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	100%	44%
JF. Analis Hukum Ahli Pertama	8	100%	24%
JF. Analis Hukum Ahli Muda	9	100%	4 %
JF. Analis Hukum Ahli Madya	11	100%	27 %
JF Perencana ahli Pertama	8	100%	24%
JF. Pranata Humas Ahli Pertama	8	100%	24%

Handwritten signature

JF. Pranata Humas Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100 %	12%
J.F. Analis Kebijakan Pertama	8	100%	24%
J.F. Analis Kebijakan Muda	9	100%	4 %
J.F. Analis Kebijakan Madya	11	100%	27 %
JF Analisis Hukum Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	100%	45%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	24%
JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	100 %	12%

- a) Klasifikasi II A adalah Inspektorat Daerah Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	32%
4	-	-
5	60%	19%
6	70%	23%
7	70%	32%
8	100%	84%
9	100%	63%
10	-	-
11	100%	78%
12	100%	57%
13	-	-
14	100%	109%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Purwakarta

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
P2UPD PERTAMA	8	100%	60%
P2UPD MUDA	9	100%	36%
P2UPD MADYA	11	100%	46%
AUDITOR PERTAMA	8	100%	60%
AUDITOR MUDA	10	100%	28%
AUDITOR MADYA	12	100%	17 %
AUDITOR UTAMA	14	100%	9%
AUDITOR PENYELIA	9	100%	23%
JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	100 %	12%
JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7	100 %	19%
JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	100%	4%
JF AUDITOR AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN AHLI PERTAMA	8	100%	24%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	24%

2. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah

a) Jabatan Struktural /Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	33%
4	-	-

Handwritten signature/initials in blue ink.

5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%
8	100%	74%
9	100%	55%
10	-	-
11	100%	71%
12	100%	55%
13	-	-
14	100%	92%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Keuangan dan Aset Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Keuangan Pemerintahan Pusat Dan daerah Ahli Madya	11	100%	10 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22 %
JF Perencana Ahli Muda	9	100%	4 %
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	100%	22 %

29/6/2024

3. Klasifikasi II C adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	32%
4	-	-
5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%
8	100%	74%
9	100%	55%
10	-	-
11	100%	71%
12	100%	51%
13	-	-
14	100%	85%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Perencana Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Muda	9	100%	4%
JF Perencana Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	12%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	22%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	22%

Handwritten signature/initials in blue ink.

JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	100%	22%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	22%

4. Klasifikasi III A, terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - b. Dinas Perumahan dan Pemukiman
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	48%
2	-	-
3	70%	33%
4	-	-
5	60%	17%
6	70%	20%
7	70%	33%
8	100%	74%
9	100%	55%
10	-	-
11	100%	70%
12	100%	49%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu BKPSDM

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	9	100%	4%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Pertama	8	100%	22%
JF Widyaiswara Ahli Muda	9	100%	4%
JF Widyaiswara Ahli Madya	11	100%	10%
JF Widyaiswara Ahli Utama	13	80%	2%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	12%

Handwritten signature in blue ink.

JF Pranata komputer terampil	6	100%	12%
JF Pranata komputer Ahli pertama	8	100%	22%
JF Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	100%	12%
JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	100%	22%
JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	100%	12%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana/ Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Pengairan Pelaksana lanjutan/ Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan penyelia	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Pengairan/ Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%

Handwritten signature

JF Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola jalan dan jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Jalan/Penata Kelola jalan dan jembatan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	12%
JF Pranata Komputer Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/Penata Kelola perumahan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Ruang Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Ruang Ahli Madya	11	100%	10%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	100%	10%
JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	100%	12%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	22%

2969/2021

JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%
-----------------------------------	---	------	-----

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	100%	22%
JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	100%	4%
JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	100%	12%
JF Teknik Penatakelola Perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	100%	22%
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	22%

5. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III B.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%

Handwritten signature in blue ink.

8	100%	70%
9	100%	51%
10	-	-
11	100%	67%
12	100%	48%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Analis Keuangan Pemerintah pusat dan daerah Ahli Muda	9	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	22%

6. Klasifikasi III C, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	38%
2	-	-
3	70%	25%
4	-	
5	60%	70%
6	70%	14%
7	70%	18%
8	100%	66%
9	100%	47%
10	-	-
11	100%	55%
12	100%	39%
13	-	-
14	100%	84%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kepegawaian Pertama	8	100%	12%
JF Analisis Kepegawaian Muda	9	80%	15%
JF Analisis Kepegawaian Madya	11	100%	8%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	100%	12%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	6%
Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	12%
Jf. Pustakawan Ahli Pertama	8	100%	12%

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
----------------	----------------------	--------------------	----------------------

Handwritten signature

JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	100%	19%
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	100%	7%
JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	80%	15%
JF Apoteker Muda	9	80%	16%
JF Apoteker Madya	11	100%	8%
JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	100%	6%
JF Analisis Kepegawaian Pertama	8		
JF Analisis Kepegawaian Muda	9	80%	15%
JF Efidemiologi Kesehatan Muda	9	80%	29%
JF Administrator Kesehatan Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	12%
JF Administrator Kesehatan Pertama	8	100%	14%
Dokter Ahli Pertama	8	100%	22%
JF Perekam medis Terampil	6	100%	6%
Saniteran Terampil	6	100%	6%
JF Asisten Apoteker Terampil	6	100%	6%
JF Apoteker Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	80%	17%
JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	100%	6%
JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Efidemiologi Kesehatan Terampil	6	100%	6%

JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	100%	6%
JF Dokter Ahli Madya	11	80%	17%
JF. Asisten Apoteker Penyelia	8	100%	7%
JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	12%
JF.Pranata Komputer Terampil	6	100%	6%

- a) Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	35%
4	-	-
5	60%	14%
6	70%	17%
7	70%	28%
8	100%	62%
9	100%	44%
10	-	-
11	100%	72%
12	100%	43%
13	-	-
14	100%	84%

- b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF.ARSIPARIS PERTAMA	8	100%	15%
JF.ARSIPARIS MUDA	9	100%	17%
JF ARSIPARIS PELAKSANA/ TERAMPIL	6	100%	3%
JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	100%	19%
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	6	100%	3%

7. Klasifikasi III E, terdiri dari :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
- c. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III E

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	70%	28%
4	-	-
5	60%	9%
6	70%	11%
7	70%	21%
8	100%	62%
9	100%	44%
10	-	-
11	100%	41%
12	100%	33%
13	-	-
14	100%	55%

- b) Fungsional Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	3%

JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
---	---	------	-----

c) Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	80%	17%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula	5	70%	9%
JF Fungsional Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	100%	3%
JF Perencanaan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	70%	9%

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	3%
JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pranata komputer pertama	8	100%	14%
JF Pranata komputer Muda	9	80%	17%
JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	100%	14%
JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	80%	17%
JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	100%	3%

JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	100%	3%
JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Dinas Perhubungan.
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 10. Dinas Perikanan dan Peternakan
 11. Dinas Lingkungan Hidup.
 12. Dinas Pangan dan Pertanian
 13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III F

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	100%	8%
2	-	-
3	70%	25%
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	28%
9	100%	14%
10	-	-
11	100%	25%

12	100%	5%
13	-	-
14	100%	55%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8		
JF Perencana Ahli Pertama	8		

c) Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	60%	9%
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	80%	6%
JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	80%	21%
JF. Polisi Pamong Praja Penyelia	8	100%	7%
JF. Polisi Pamong Praja Pertama	8	100%	12%
JF. Polisi Pamong Praja Muda	9	80%	15%
JF. Polisi Pamong Praja Madya	11	100%	8%

Handwritten signature in blue ink.

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	100%	10%
JF Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	100%	8%

e) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	21%
JF Pranata Komputer Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Muda	9	80%	15%
JF Pranata Komputer Madya	11	100%	8%
JF Statistisi Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8		

f) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	100%	7%
JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	80%	15%
JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	100%	8%
JF. Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	100%	4%

g) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Sosial Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Sosial Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Sosial Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

h) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analis Hukum Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Perama	8	100%	14%

i) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Pelaksana Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	100%	19%
JF Arsiparis Penyelia	8	100%	7%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis muda	9	80%	15%
JF Arsiparis madya	11	100%	15%
JF Pranata Komputer pertama	8	100%	7%

JF Pranata Komputer Muda	9	80%	15%
JF Pustakawan Terampil	6	100%	4%
JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pustakawan Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	4%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%

j) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Instruktur Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Instruktur Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Instruktur Penyelia	8	100%	7%
JF Instruktur Pertama	8	100%	7%
JF Instruktur Muda	9	80%	15%
JF Instruktur Ahli Madya	11	100%	2%
JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	100%	4%
JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Pengantar Kerja Penyelia	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	80%	15%
JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	100%	2%

Handwritten signature in blue ink.

JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	80%	15%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	100%	2%
JF Arsiparis Ahli Muda	9	80%	15%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Instruktur Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%

k) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Paramedik Veteriner Pemula	5	70%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	100%	8%
JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh pertanian Ahli Pertama (Peternakan)	8	100%	10%
JF Penyuluh pertanian Ahli Muda (Peternakan)	9	80%	17%
JF Penyuluh Pertanian Penyelia (Peternakan)	8	100%	10%

JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/ Terampil	6	100%	8%
JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	19%
JF Analisis Akuakultur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%

l) Jabatan Fungsional Tertentu Lingkungan Hidup

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pengawas Lingkungan Hidup pertama	8	100%	14%
JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	100%	8%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	80%	17%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	100%	8%

JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	100%	14%

m) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	70%	8%
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	100%	8%
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	100%	22%
JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	100%	10%
JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Pertanian Muda	9	80%	17%
JF Penyuluh Pertanian Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Muda	9	80%	17%
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	100%	22%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan pemula	5	70%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana/terampil	6	100%	8%
JF Pengendali Organisme Pengganggu	7	100%	22%

tumbuhan Pelaksana Lanjutan/Mahir			
-----------------------------------	--	--	--

n) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
Penera Pelaksana/Terampil	6	100%	4%
JF Arsiparis Pertama	8	100%	7%
JF Penera Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Penera Ahli Muda	9	80%	17%
JF Penera Ahli Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Kemetrolagian Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Kemetrolagian Madya	11	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Pertama	8	100%	14%
JF Pengawas Koperasi Muda	9	100%	8%
JF Pengawas Koperasi Madya	11	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	100%	14%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	100%	8%
JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	100%	8%
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Analisi Perdagangan Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

o) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Arsiparis Terampil	6	100%	8%
Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	14%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	14%

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi IV A

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	30%
9	100%	16%
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	100%	10%

b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	80%	15%

JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	100%	8%
JF Perencana Ahli Pertama	8	100%	7%
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	100%	7%
Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8	100%	7%
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	100%	7%

c) Klasifikasi IV B adalah Kecamatan

a) Kecamatan

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	70%	38%
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	70%	18%
8	100%	30%
9	100%	16%
10	-	-
11	100%	37%
12	100%	33%

b) Jabatan Fungsional Tertentu:

JABATAN	KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
JF Pranata Komputer Terampil	6	100%	8%

c) Kelurahan

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	-	-
2	-	-
3	-	-

4	-	-
5	60%	7%
6	70%	8%
7	-	-

d) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	Kasi pada kelurahan	8	100%	28%
2	Sekretaris lurah	8	100%	30%
3	Lurah	9	100%	63%

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	<i>AS</i>
Dani Abdurahman, SH, MH	Plt. Inspektur Inspektorat Daerah	<i>DA</i>
H.Wahyu Wibisono, S.Sos,M.Si, C.MT,C.AC	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<i>HW</i>
R. Muchamad Nurcahja, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	<i>MR</i>
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	<i>NH</i>
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	<i>ST</i>
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	<i>TS</i>
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	<i>NN</i>

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI PURWAKARTA,

B
BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWAKARTA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. Klasifikasi I adalah Sekretariat Daerah

a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana
 Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.237.593
2	-
3	1.892.467
4	-
5	2.727.379
6	3.840.595
7	4.953.811
8	10.123.357
9	11.178.688
10	-
11	-
12	18.383.456
13	20.970.305
14	24.720.353
15	41.553.570

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	-
4	-
5	3.500.000
6	4.500.000
7	5.500.000
8	12.000.000
9	13.000.000
10	-
11	-
12	19.300.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Pertama	8	6.846.278
2.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda	9	7.120.000
3.	J.F. Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya	11	11.500.000
4.	JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
5.	J.F. Arsiparis Penyelia	8	6.846.278
6.	J.F. Arsiparis Pertama	8	6.846.278
7.	J.F. Arsiparis Muda	9	7.120.000
8.	J.F. Arsiparis Madya	11	11.500.000
9.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	8.000.000
10.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9	9.000.000
11.	JF Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	13.000.000
12.	JF. Analis Hukum Ahli Pertama	8	6.846.278

Handwritten signature

13.	JF. Analis Hukum Ahli Muda	9	7.120.000
14.	JF. Analis Hukum Ahli Madya	11	11.500.000
15.	JF Perencana ahli Pertama	8	6.846.278
16.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	6	4.265.881
17.	JF. Pranata Humas Ahli Pertama	8	6.846.278
18.	JF. Pranata Humas Ahli Muda	9	7.120.000
19.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.878.074
20.	J.F. Analis Kebijakan Pertama	8	6.846.278
21.	J.F. Analis Kebijakan Muda	9	7.120.000
22.	J.F. Analis Kebijakan Madya	11	11.500.000
23.	JF Analisis Hukum Ahli Pertama	8	6.846.278
24.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	6.846.278
25.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.846.278
26.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	3.878.074

2. Klasifikasi II A adalah Inspektorat
a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Inspektorat

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.892.467
4	-
5	2.776.066
6	3.912.068
7	4.969.546
8	10.123.357
9	11.178.688

Handwritten signature

10	-
11	16.158.542
12	18.383.456
13	-
14	34.097.875

b. Jabatan Fungsional Tertentu Inspektorat

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF P2UPD PERTAMA	8	8.796.570
2.	JF P2UPD MUDA	9	9.311.994
3.	JF P2UPD MADYA	11	13.263.578
4.	JF AUDITOR PERTAMA	8	8.796.570
5.	JF AUDITOR MUDA	10	10.100.000
6.	JF AUDITOR MADYA	12	13.760.000
7.	JF AUDITOR UTAMA	14	17.800.000
8.	JF AUDITOR PELAKSANA/ TERAMPIL	6	3.878.074
9.	JF AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
10.	JF AUDITOR PENYELIA	8	8.452.954
11.	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.846.278
12.	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	7.120.000
13	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.846.278
14	JF AUDITOR AHLI PERTAMA	8	6.846.278
15	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN AHLI PERTAMA	8	6.846.278
15	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.846.278

- a. Klasifikasi II B adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.781.981
4	-
5	2.700.974
6	3.803.412
7	4.982.505
8	9.592.075
9	10.592.021
10	-
11	15.499.595
12	17.694.136
13	-
14	30.272.269

b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
2	JF PERENCANA AHLI MUDA	9	7.100.000
3	JF PERENCANA AHLI MADYA	11	9.969.917
4	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074
5	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
6	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	6.708.634
7	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	9	7.100.000
8	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
9	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634

1. Klasifikasi III A, terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- b. Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta

Handwritten signature

- c. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta
 a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III A

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.237.593
2	-
3	1.781.981
4	-
5	2.700.974
6	3.803.412
7	4.982.505
8	9.588.512
9	10.588.086
10	-
11	15,362,596
12	17,610.149
13	-
14	30.093.135

- b) Jabatan Fungsional Tertentu BKPSDM

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	6.708.634
2	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	9	7.100.000
3	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	11	9.969.917
4	JF WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
5	JF WIDYAISWARA AHLI MUDA	9	7.100.000
6	JF WIDYAISWARA AHLI MADYA	11	9.969.917
7	JF WIDYAISWARA AHLI UTAMA	13	12.000.000
8	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.878.074
9	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074

Handwritten signature in blue ink.

10	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
11	JF ASESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	6.708.634
12	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	6.708.634
13	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	3.878.074
14	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	6.708.634
15	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.878.074

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas PUTR

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana/Terampil	6	3.878.074
2	JF Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	6.708.634
4	JF Teknik Pengairan pelaksana/ Terampil	6	3.878.074
5	JF Teknik Pengairan pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
6	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan penyelia	8	6.708.634
7	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Pertama	8	6.708.634
8	JF Teknik pengairan /Penata Kelola Perairan Ahli Muda	9	7.100.000
9	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
10	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
11	JF Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan jembatan Ahli Madya	11	9.969.917
12	JF Pranata komputer pelaksana/ Terampil	6	3.878.074
13	JF Pranata komputer pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000
14	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
15	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Muda	9	7.100.000
16	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan / Penata kelola Perumahan Ahli Madya	11	9.969.917
17	JF. Penata Ruang Ahli Pertama	8	6.708.634

Handwritten signature or initials in blue ink.

18	JF. Penata Ruang Ahli Muda	9	7.100.000
19	JF. Penata Ruang Ahli Madya	11	9.969.917
20	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	6.708.634
21	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	7.100.000
22	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	9.969.917
23	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	6.708.634
24	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	7.100.000
25	JF Penata Pengelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	9.969.917
26	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.708.634
27	JF Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	3.878.074
28	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.708.634
29	JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
2.	JF Teknik Penyehatan lingkungan Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Penata Kelola Penyehatan lingkungan Ahli Pertama	8	6.708.634
4.	JF Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	3.878.074
5.	JF Teknik Penatakelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
6.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	8	6.708.634
7.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	6.708.634
8.	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.708.634

2. Klasifikasi III B adalah Badan Pendapatan Daerah
a. Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Badan Pendapatan Daerah

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.176.000

Handwritten signature

2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	9.367.263
9	10.343.773
10	-
11	15.144.517
12	17.322.290
13	-
14	30.098.727

b. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Pendapatan Daerah

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli pertama	8	6.708.634
2.	JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	7.100.000
3.	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.552.000
4.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634
6.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	7.100.000
7.	JF Arsiparis Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	6.708.634
10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.708.634

3. Klasifikasi III C, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan

- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III C

Handwritten signature in blue ink.

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	1.632.000
4	-
5	2.352.000
6	3.532.800
7	4.272.000
8	9.116.800
9	10.067.200
10	-
11	14.069.600
12	16.243.200
13	-
14	30.025.200

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Analis SDM Aparatur Pertama	8	6.144.000
2	JF Analis SDM Aparatur Muda	9	6.504.000
3	JF Analis SDM Aparatur Madya	11	9.744.000
4	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.144.000
5	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	6.504.000
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.144.000
7	JF Pamong Belajar Ahli Pertama	8	6.144.000
8	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.624.000
9	Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	
10	Jf. Pustakawan Ahli Pertama	8	

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	9.744.000
4	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat lanjutan	7	4.824.000

Handwritten signature in blue ink.

5	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat penyelia	8	5.904.000
6	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
7	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	5.904.000
8	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	6.504.000
9	JF Apoteker Ahli Muda	9	6.576.000
10	JF Apoteker Ahli Madya	11	9.744.000
11	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	3.624.000
12	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.144.000
13	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	9	6.504.000
14	JF Efidemologi Kesehatan Ahli Muda	9	7.464.000
15	JF Administrator Kesehatan Muda	9	6.648.000
16	JF Pranata Komputer Pertama	8	6.144.000
17	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	6.288.000
18	Dokter Ahli Pertama	9	7.464.000
19	JF Perekam medis Terampil	6	3.624.000
20	Sanitarian Terampil	6	3.624.000
21	JF Asisten Apoteker Terampil	6	3.624.000
22	JF Apoteker Ahli Pertama	8	6.288.000
23	JF Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Muda	9	6.648.000
24	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	4.824.000
25	JF Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	6	3.624.000
26	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	6.288.000
27	JF Efidemologi Kesehatan Terampil	6	3.624.000
28	JF Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	6	3.624.000
29	JF Dokter Ahli Madya	11	9.744.000
30	Asisten Apoteker Penyelia	8	5.904.000
31	JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
32	JF.Pranata Komputer Terampil	6	3.624.000

4. Klasifikasi III D adalah Sekretariat DPRD

- a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Sekretariat DPRD

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.686.400

4	-
5	2.609.520
6	3.674.631
7	4.739.741
8	8.909.600
9	9.273.762
10	-
11	15.618.470
12	16.255.902
13	-
14	30.272.269

b) Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat DPRD

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF.ARSIPARIS PERTAMA	8	6.339.125
2	JF.ARSIPARIS MUDA	9	6.504.000
3	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.522.000
4	JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4.824.000
5	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	3.522.000

5. Klasifikasi III E, terdiri dari :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Purwakarta.
 - c. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
- a) Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana Klasifikasi III E

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	1.686.400
4	-
5	2.430.400
6	3.422.400
7	4.414.400

Handwritten signature in blue ink.

8	8.909.600
9	9.838.400
10	-
11	12.760.800
12	15.566.400
13	-
14	25.259.321

b) Jabatan Fungsional Tertentu DPMPTSP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penata Perizinan Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Pertama	8	6.288.000
6.	JF Penata Kelola penanaman Modal Ahli Muda	9	6.648.000
7.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.522.000
8.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	6.288.000

c) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Analis Kebakaran Pertama	8	6.288.000
2.	JF Analis Kebakaran Muda	9	6.648.000
3.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.736.000
4.	JF Pemadam Kebakaran Pelaksana	6	3.522.000
5.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	6.288.000
6.	JF Perencanaan Ahli Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	2.736.000

d) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata komputer Pelaksana/Terampil	6	3.522.000
2	JF Pranata komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
3	JF Pranata komputer pertama	8	6.288.000
4	JF Pranata komputer Muda	9	6.648.000
5	JF Administrator Data Base Kependudukan pertama	8	6.288.000
6	JF Administrator Data Base Kependudukan Muda	9	6.648.000
7	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.522.000
8	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
9	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Terampil	6	3.522.000
10	JF Operator Sistem Informasi Administrasi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
11.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	6.288.000
12.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

10. Klasifikasi III F, terdiri dari :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dinas Perhubungan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta.
8. Dinas Arsip dan Perpustakaan
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10. Dinas Perikanan dan Peternakan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pangan dan Pertanian
13. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	1.632.000
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.044.800
9	7.779.200
10	-
11	11.288.400
12	12.351.600
13	-
14	25.259.321

b) Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF. Arsiparis Ahli Pertama	8	5.904.000
3	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
4	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	
5	JF Perencana Ahli Pertama	8	

c. Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	2.424.000
2	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	6	3.624.000
3	JF. Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.896.000
4	JF. Polisi Pamong Praja Penyelia	8	5.904.000
5	JF. Polisi Pamong Praja Pertama	8	6.144.000
6	JF. Polisi Pamong Praja Muda	9	6.504.000

7	JF. Polisi Pamong Praja Madya	11	9.744.000
8	JF Polisi Pamong Praja Pemula	5	

d. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	6.048.000
4	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
5	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

e. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
2	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.896.000
3	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000
4	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
5	JF Pranata Komputer Madya	11	9.744.000
6	JF Statistisi Ahli Pertama	8	5.904.000

a. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF. Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF. Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	6.504.000

3	JF. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya	11	9.264.000
4	JF. Arsiparis pelaksana/Terampil	6	3.552.000
5	JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5.904.000
6	JF Perencanaan Ahli Pertama	8	5.904.000

f. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Penyuluh Sosial Pertama	8	6.288.000
2	JF Penyuluh Sosial Muda	9	6.648.000
3	JF Penyuluh Sosial Madya	11	9.264.000
4	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4,824,000
5	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
6	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
7	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	8	6.648.000
8	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	6.288.000
9	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
10	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	6.288.000
11.	JF Arsiparis Terampil	6	3.696.000
12.	JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	6.288.000
13.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

a. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000
2	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
3	JF Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
4	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	5.904.000
5	JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	5.904.000
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000

Handwritten signature in blue ink.

b. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Pelaksana /Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Arsiparis Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
5.	JF Arsiparis Muda	9	6.504.000
6.	JF Arsiparis madya	11	10.449.917
7.	JF Pranata Komputer Pertama	8	5.904.000
8.	JF Pranata Komputer Muda	9	6.504.000
9.	JF Pustakawan Terampil	6	3.552.000
10.	JF Asisten Perpustakaan pelaksana/Terampil	6	3.552.000
11.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	5.904.000
12.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	5.904.000
13.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
14.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000

c. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Instruktur Pelaksana	6	3.552.000
2.	JF Instruktur Pelaksana Lanjutan /Mahir	7	4.824.000
3.	JF Instruktur Penyelia	8	5.904.000
4.	JF Instruktur Pertama	8	5.904.000
5.	JF Instruktur Ahli Muda	9	6.504.000
6.	JF Instruktur Ahli Madya	11	9.264.000
7.	JF Pengantar Kerja Pelaksana/ Terampil	6	3.552.000
8.	JF Pengantar Kerja Pelaksana lanjutan/Mahir	7	4.824.000

9.	JF Pengantar Kerja Penyelia	8	5.904.000
10.	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	5.904.000
11.	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	9	6.504.000
12.	JF Pengantar Kerja Ahli Madya	11	9.264.000
13.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	5.904.000
14.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	6.504.000
15.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	11	9.264.000
16.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	6.504.000
17.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
18.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
19.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	5.904.000
20.	JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	5.904.000
21.	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	5.904.000
22.	JF Instruktur Ahli Pertama	8	5.904.000
23.	JF Peranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

d. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Paramedik Veteriner Pemula	5	2.736.000
2.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
3.	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
4.	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Penyuluh pertanian Ahli Pertama (Peternakan)	8	6.288.000
7.	JF Penyuluh pertanian Ahli Muda (Peternakan)	9	6.648.000
8.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia (Peternakan)	8	6.048.000
9.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Pertama	8	6.288.000
10.	JF Pengendali hama dan penyakit ikan Ahli Muda	9	6.648.000

11.	JF Pengawas Bibit Ternak pelaksana/ Terampil	6	3.696.000
12.	JF Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
13.	JF Arsiparis Terampil	6	3.696.000
14.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.824.000
15.	JF Analis Akuakultur Ahli Pertama	8	6.288.000
16.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000
17.	JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	6.288.000
18.	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	6.288.000
20.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.696.000

e. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Lingkungan Hidup

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	6.288.000
2.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	6.648.000
3.	JF Pegawai Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	6.288.000
5.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	6.648.000
6.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	11	9.744.000
7.	JF Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

f. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pangan dan Pertanian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Penyuluh Pertanian Pemula	5	2.736.000
2.	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil	6	3.696.000
3.	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
4.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	6.048.000
5.	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	6.288.000

6.	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	6.648.000
7.	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	9.744.000
8.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian pertama	8	6.288.000
9.	JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda	9	6.648.000
10.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.696.000
11.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
12.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pemula	5	2.736.000
13.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan Pelaksana	6	3.696.000
14.	JF Pengendali Organisme Pengganggu tumbuhan – Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	4.968.000
15.	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	6.288.000
16.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	6.288.000

g. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	Penera Pelaksana/Terampil	6	3.552.000
2.	JF Arsiparis Pertama	8	5.904.000
3.	JF Penera Ahli Pertama	8	6.288.000
4.	JF Penera Ahli Muda	9	6.648.000
5.	JF Penera Ahli Madya	11	9.744.000
6.	JF Pengawas K metrologian Pertama	8	6.288.000
7.	JF Pengawas K metrologian Muda	9	6.648.000
8.	JF Pengawas K metrologian Madya	11	9.744.000
9.	JF Pengawas Koperasi Pertama	8	6.288.000
10.	JF Pengawas Koperasi Muda	9	6.648.000
11.	JF Pengawas Koperasi Madya	11	9.744.000
12.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan pertama	8	6.288.000

Handwritten signature in blue ink.

13.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Muda	9	6.648.000
14.	JF Penyuluh Perindustrian dan perdagangan Madya	11	9.744.000
15.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
16.	JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000

h. Jabatan Fungsional Tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Arsiparis Terampil	6	3.552.000
2.	JF.Pranata Komputer Terampil	6	3.552.000
	JF. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	6.288.000
	JF. Perencana Ahli Pertama	8	6.288.000

11. Klasifikasi IV A, terdiri dari :

Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Jabatan Struktural/ Fungsional Hasil Penyetaraan dan Jabatan Pelaksana

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.044.800
9	7.915.000
10	-

296944800

11	-
12	-
13	16.180.000

- b) Jabatan Fungsional Tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	5.904.000
2.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	6.504.000
3.	JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	11	9.744.000
4.	JF Perencana Ahli Pertama	8	5.904.000
5.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5.904.000

12. Klasifikasi IV B adalah Kecamatan

- a) Kecamatan

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	1.216.000
2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	4.272.000
8	7.180.800
9	7.915.200
10	-
11	12.433.600
12	15.556.800

Handwritten signature

b) Jabatan Fungsional Tertentu:

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1.	JF Pranata Komputer Terampil	6	3.552.000

c) Kelurahan

KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	-
2	-
3	-
4	-
5	2.352.000
6	3.312.000
7	-

d) Kelas 8 dan 9 pada Kelurahan

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER JABATAN (Rp.)
1	Kasi pada Kelurahan	8	7.044.800
2	Sekretaris Lurah	8	7.180.800
3	Lurah	9	11.178.688

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	7
Dani Abdurahman, SH, MH	Plt. Inspektur Inspektorat Daerah	7
H.Wahyu Wibisono, S.Sos,M.Si, C.MT,C.AC	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7
R. Muchamad Nurcahja, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	7
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	9
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	6
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	6
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	7









Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KETENTUAN PENGURANGAN TPP PEGAWAI YANG TERLAMBAT
 MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	>91 menit dan atau tidak input hadir masuk kerja	1,5 %

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	
Dani Abdurahman, SH, MH	Plt. Inspektur Inspektorat Daerah	
H.Wahyu Wibisono, S.Sos,M.Si, C.MT,C.AC	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
R. Muchamad Nurcahja, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	









Ditetapkan di Purwakarta
 pada tanggal 18 Pebruari 2025
 Pj. BUPATI PURWAKARTA,


 BENNI IRWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KETENTUAN PENGURANGAN TPP PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM
 WAKTUNYA (PSW)

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU (MENIT)	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak input hadir masuk kerja	1,55 %

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	
Dani Abdurahman, SH, MH	Plt. Inspektur Inspektorat Daerah	
H.Wahyu Wibisono, S.Sos,M.Si, C.MT,C.AC	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
R. Muchamad Nurcahja, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
 pada tanggal 18 Pebruari 2025

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


 BENNI IRWAN